

STATISTIK

— 2016 —

PENDIDIKAN

KABUPATEN PINRANG

<https://pinrangkab.bps.go.id>



STATISTIK

— 2016 —

PENDIDIKAN

KABUPATEN PINRANG

<https://pinrangkab.bps.go.id>

STATISTIK PENDIDIKAN

Kabupaten Pinrang 2016

Katalog BPS: 4301002.7315

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: v + 39

Naskah:

Veronika Ratih Andriani, SST

Staf Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Pinrang

Gambar Kulit:

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Publikasi dengan judul “**Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2016**” ini merupakan publikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2016, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Pendidikan di Pinrang secara umum.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bagian, yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka buta huruf, penduduk yang tidak bersekolah lagi, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penyajian publikasi ini di susun secara deskriptif dalam bentuk narasi, ulasan singkat, dan grafik yang berbasis gender, serta dilampirkan tabel-tabel pendukung untuk menunjang informasi.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Pinrang, November 2017

BPS KABUPATEN PINRANG

Kepala



H. Muh. Asri Lantong, SE

19661121 1993011 001

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II	
Metodologi	6
2.1. Ruang Lingkup	6
2.2. Kerangka Sampel	7
2.3. Rancangan Sampel	7
2.4. Metode Pengumpulan Data	8
2.5. Pengolahan Data	9

Bab III	
Konsep dan Definisi	10
Bab IV	
Pembahasan	14
4.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	15
4.1.1 Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	16
4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP Dan SMA.....	18
4.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP Dan SMA.....	20
4.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP Dan SMA.....	22
4.2. Angka Buta Huruf.....	24
4.3. Penduduk Yang Tidak Bersekolah Lagi.....	29
4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	30
4.5. Fasilitas Pendidikan Dan Jumlah Siswa.....	31
4.6. Rasio Murid/Siswa Terhadap Sekolah Dan Guru.....	34
Bab V	
Penutup	37
5.1. Kesimpulan.....	37
Daftar Pustaka	39

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Pinrang 2016	18
Tabel 2. Jumlah Sekolah, Tenaga Pendidik, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	33

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	19
Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	22
Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	23
Gambar 4. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	26
Gambar 5. Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	27
Gambar 6. Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	30
Gambar 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	31
Gambar 8. Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	34
Gambar 9. Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	35
Gambar 10. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	36

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (civilized). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana, mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat mencetak manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan dibidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat **“MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA”**.

Pada umumnya, pendidikan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (meliputi SD dan SMP atau sederajat), pendidikan menengah (meliputi SMA dan SMK, atau sederajat), dan pendidikan tinggi (strata dan non strata).

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin,1996:24). Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Disamping sarana dan prasarana pendidikan, seperti jumlah sekolah, serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait. Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi. Terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antar penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan, disamping kultur sosial dan budaya yang

berbeda antar daerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan.

Dalam publikasi ”**Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2016**” ini disajikan data pendidikan yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016 berupa rangkuman beberapa indikator pendidikan.

Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Pinrang akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.2. Tujuan

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini, antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Kabupaten Pinrang.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Kabupaten Pinrang untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan.

3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

1.3. Sumber Data

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor tahun 2016. Susenas merupakan survei semesteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak diseluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Pinrang, sampelnya tersebar di 12 kecamatan yang mencakup seluruh wilayah baik perkotaan maupun perdesaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini tersusun dalam 5 (lima) bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika;

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.

BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.

BAB IV. PEMBAHASAN, meliputi Angka partisipasi Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Putus Sekolah, Penduduk Tidak Sekolah, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

BAB V. PENUTUP

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab II

Metodologi

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016. Data yang digunakan dalam publikasi ini merupakan sampel dari kegiatan Susenas Maret 2016. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. Ruang Lingkup

Susenas 2016 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 300.000 rumah tangga yang tersebar dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Kabupaten Pinrang, jumlah sampelnya sebanyak 600 rumah tangga, tersebar dalam 60 blok sensus¹ di wilayah perkotaan dan perdesaan. Data yang dikumpulkan dalam Susenas

¹ Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

2.2. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan blok sensus terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus daerah perkotaan/perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan/perdesaan di setiap kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk 2010 (SP2010). Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil update daftar hasil SP2010 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P.

2.3. Rancangan Sampel

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016 dilaksanakan setiap semesteran. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap. **Tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus

secara Probability Proportional to Size (PPS)² – Linear Systematic Sampling dengan size banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus hasil Sensus Penduduk 2010. Tahap kedua, dari sejumlah rumah tangga hasil update di setiap blok sensus terpilih dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara Linear Systematic Sampling³

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

² *Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu desain pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

³ *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pendidikan terakhir.

2.5. Pengolahan Data

Pengolahan, dilakukan mulai dari pengolahan manual (prakomputer) yang meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (batching), pemberian kode (coding) serta penyuntingan (editing) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (data entry), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (validation) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.

Bab III

Konsep dan Definisi

Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

Sekolah adalah sekolah formal maupun non formal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah (play group dan taman kanak-kanak), kursus-kursus (mengetik, komputer, bahasa dan sejenisnya), kursus kedinasan (Diklatpim IV, III, II, Lemhanas) dan kejar paket A, B, atau C sebagai sekolah nonformal.

Seseorang dikatakan **sedang/masih bersekolah** apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. **Aktif mengikuti pendidikan** maksudnya bahwa ia secara fisik mengikuti pelajaran di kelas, termasuk yang tidak mengikuti pelajaran di kelas tetapi diperbolehkan mengikuti ujian. **Jenjang pendidikan** dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Jenjang pendidikan dasar, meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat, serta Sekolah Menengah Tingkat

Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat.

2. Jenjang pendidikan menengah, meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat.

3. Jenjang pendidikan tinggi, meliputi semua pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan menengah. Terbagi dalam dua jalur;

Program Gelar (Strata atau disebut juga Jalur Akademik), yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian akademik mengenai penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi mencakup pendidikan sarjana muda (S0), sarjana/strata-1 (S1), strata-2 (S2), dan strata-3 (S3)

Program Non Gelar (Non Strata atau disebut juga Jalur Profesional), yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Program ini pada umumnya adalah program pendidikan diploma yang meliputi Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) atau setara dengan sarjana muda dan Diploma IV (DIV) atau setara dengan sarjana.

Status pendidikan adalah keadaan seseorang/penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi:

1. Tidak/belum pernah bersekolah adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.

2. Masih bersekolah adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.

3. Tidak bersekolah lagi adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Penduduk dikatakan **mampu baca tulis** jika dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Orang buta yang dapat membaca huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab IV

Pembahasan

Dalam menyusun indikator pendidikan, indikator-indikator diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan, yaitu (1) pendidikan umum, (2) pendidikan masyarakat, dan (3) pendidikan kedinasan. Oleh karena sebagian besar sumber data publikasi ini berasal dari susenas, maka dalam ulasannya hanya mencoba menguraikan tentang pendidikan umum saja. Berhubung makna pendidikan umum kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka indikator yang diidentifikasi berlaku untuk:

1. Jenjang pendidikan dasar yang meliputi pendidikan Prasekolah, pendidikan Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah, SDLB dan SD Terpadu).
2. Pendidikan menengah yang meliputi menengah pertama umum/Madrasah Tsanawiyah maupun kejuruan dan menengah lanjutan umum/Madrasah Aliyah maupun kejuruan.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi Universitas, Institut, Sekolah tinggi maupun Akademi.

Gambaran tentang pendidikan di Kabupaten Pinrang dapat diukur dengan beberapa indikator pendidikan. Ada empat indikator utama yang sering digunakan. Pertama, Angka Partisipasi Sekolah bagi penduduk usia sekolah 7-18 tahun (SD hingga SMA), sebagaimana harapan pemerintah bahwa penduduk usia tersebut adalah penduduk yang dijadikan sasaran utama pembangunan bidang pendidikan. Kedua, Angka Buta Huruf (ketidak mampuan baca tulis penduduk) penduduk usia 15 tahun atau lebih, diharapkan pada kelompok usia tersebut penduduk sudah dapat membaca dan menulis. Ketiga, Angka Anak Putus Sekolah dengan mencoba melihat gambaran anak yang berada pada kelompok usia pendidikan 7-18 tahun tetapi kondisi mereka dalam keadaan tidak aktif bersekolah. Dan keempat, Angka Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berupa persentase penduduk yang minimal tamat SMA, diharapkan dengan lulus SMA penduduk sudah memiliki kualitas yang cukup memadai untuk bersaing dipasar kerja. Empat indikator utama bidang pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 diuraikan seperti berikut ini.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Usia penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama usia 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua usia 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga usia 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

4.1.1 Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syaraf motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara

bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi, ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, play group, kelompok bermain, tempat penitipan anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton -1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2016, menunjukkan bahwa angka partisipasi PAUD (5-6 tahun) di Kabupaten Pinrang mencapai 43,57 persen. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 5-6 tahun, terdapat lebih dari 43 orang sudah mengikuti pendidikan. Ini berarti pemahaman orang tua sudah mulai berkembang akan pentingnya pendidikan pada anak usia dini.

Dilihat dari Paritas Gender (PG) yang merupakan selisih antara penduduk laki-laki terhadap perempuan, terlihat bahwa nilai PG partisipasi PAUD Kabupaten Pinrang tahun 2016 sebesar 16,95 persen. Ini menandakan persentase anak perempuan usia 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki diusia yang sama. Indikator kesenjangan lainnya adalah Indeks Paritas Gender (IPG) yang merupakan perbandingan capaian penduduk perempuan terhadap laki-laki. Pada tahun 2016, IPG Kabupaten Pinrang menunjukkan nilai 0,67 persen yang berarti angka kesetaraan gender di Kabupaten Pinrang berada sudah di atas ambang batas kesenjangan gender, yaitu persentase perempuan yang sekolah PAUD pada usia 5-6 tahun lebih sedikit dibandingkan persentase laki-laki.

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Pinrang 2016

Kabupaten	Ya, pernah/sedang Sekolah			PG	IPG
	L	P	L+P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	51,47	34,52	43,57	16,95	0,67

Sumber: Susenas 2016

4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP Dan SMA

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok usia tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok usia sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formula berikut:

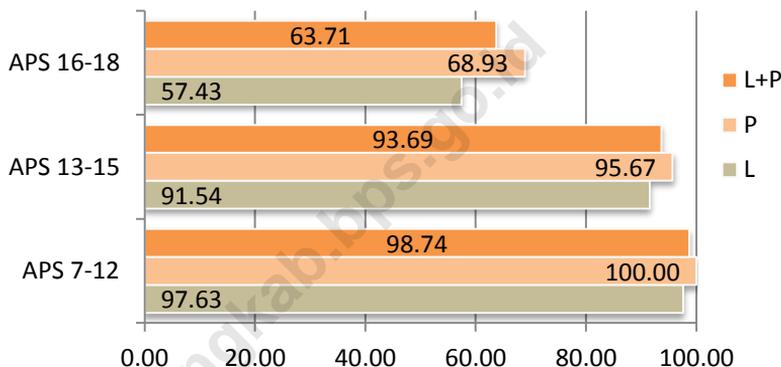
$$APS\ SD = \left(\frac{\text{Penduduk usia 7 – 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS\ SMP = \left(\frac{\text{Penduduk usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS\ SMA = \left(\frac{\text{Penduduk usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus diatas, maka didapatkan hasil untuk APS Kabupaten Pinrang seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

Pada Gambar 1 terlihat bahwa APS SD mendekati 100 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Pinrang sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada jenjang pendidikan SMP (13-15 tahun) baru mencapai 93,69 persen. Tingginya APS SD dan SMP di Pinrang ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun sebagai upaya untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup berhasil.

Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA (16-18 tahun), APS 16-18 tahun hanya mencapai 63,71 persen saja. Rendahnya APS SMA mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk

meningkatkan pencapaian pendidikan SMA pada tahun-tahun yang akan datang.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, ada perbedaan APS antara laki-laki dan perempuan. Penduduk perempuan memiliki APS yang lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Dan hal ini terjadi hampir di seluruh jenjang pendidikan. APS SD untuk perempuan telah mencapai 100 persen, sementara untuk laki-laki hanya mencapai 97,63 persen. Sementara itu, untuk APS SMP 95,67 persen untuk perempuan dan 93,69 persen untuk laki-laki. Dilihat dari sisi gender, pandangan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan sudah semakin terkikis, karena justru hal yang sebaliknya terjadi di Kabupaten Pinrang.

4.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP Dan SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun usianya, terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi usia atau melebihi usia yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah

tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$APK\ SD = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Penduduk usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

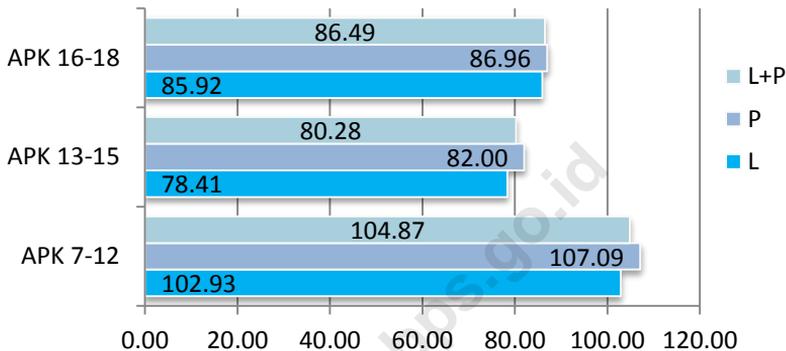
$$APK\ SMP = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang Bersekolah di SMP}}{\text{Penduduk usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APK\ SMA = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang Bersekolah di SMA}}{\text{Penduduk usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus diatas, maka didapatkan hasil untuk APK Kabupaten Pinrang terlihat bahwa pada Gambar 2. APK SD di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 sebesar 104,87 persen, yang berarti selain penduduk berusia 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan yang sama. Sementara itu, APK SMP sebesar 80,28 persen, begitu juga untuk APK SMA berada di kisaran 86,49 persen.

Tingginya angka APK pada jenjang pendidikan SD menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 6 tahunnya mengingat APK tidak memperhatikan usia dalam penghitungannya, terutama penduduk yang berusia lebih dari 7-12 tahun.

Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

4.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP Dan SMA

Selain APS dan APK diatas, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari Net Enrolment Ratio (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut :

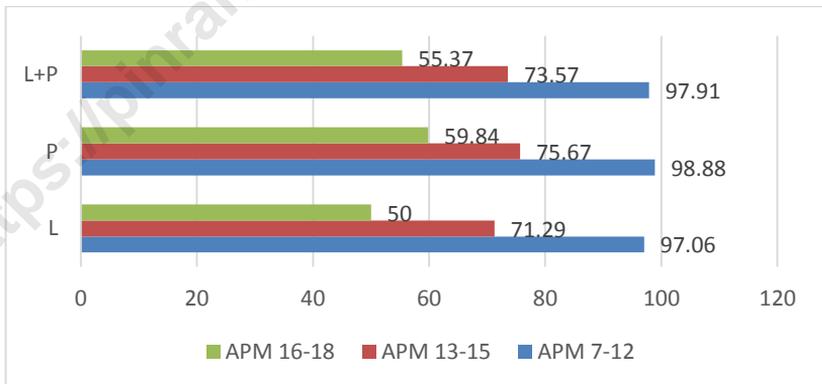
$$APM\ SD = \left(\frac{\text{Jumlah murid SD Usia 7 - 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM\ SMP = \left(\frac{\text{Jumlah murid SMP Usia 13 – 16 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 16 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM\ SMA = \left(\frac{\text{Jumlah murid SMA Usia 16 – 18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2016, APM SD di Pinrang mencapai 97,91 persen. Ada Perbedaan

APM SD antara laki- laki dan perempuan sebesar 1,82 persen. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP tahun 2016 di Pinrang sebesar 73,57 persen. Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP tidak menunjukkan perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan. Artinya, kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

Pada tahun 2016 APM SMA Pinrang mencapai 55,37 persen. Angka ini lebih rendah dari pada APM SMA di Sulawesi Selatan, yaitu 59,57 persen. APM SMA paling rendah jika dibandingkan dengan APM pada kelompok usia lain,

4.2. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Negara Indonesia

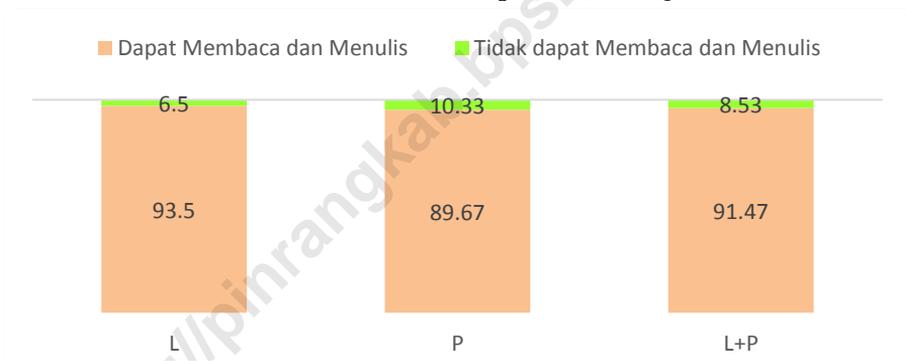
sendiri telah ikut serta menandatangani MDGs (Milenium Development Goals) yang di luncurkan oleh United Nation (PBB). Salah satu tujuannya adalah pada tahun 2015 diharapkan buta aksara di kalangan marginal dapat dikurangi minimal menjadi 50 persen. Sebagai bagian dari dunia global, Kabupaten Pinrang khususnya pun wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

Tahun 2016 tercatat penduduk Pinrang yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 91,47 persen. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Kabupaten Pinrang mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 8,53 persen. Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan

menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Gambar 4. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

Buta huruf pada penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Angka buta huruf perempuan tahun 2016 sebesar 10,33 persen sedangkan angka buta huruf laki-laki hanya 6,5 persen. Keadaan ini perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Pinrang. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket

A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan komitmen MDG'S dapat terwujud tuntas di tahun 2016.

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok usia untuk membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Gambar 5 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15- 24 tahun), kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas), di Kabupaten Pinrang tahun 2016.

Gambar 5. Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

Gambar 5 menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok usia 60 tahun keatas atau pada kelompok lansia. Sebesar 38,2 persen penduduk

lansia tergolong sebagai buta aksara. Sedangkan untuk kelompok lain, kelompok dewasa keatas (25-59) tahun terdapat 4,77 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok usia remaja (15-24) tahun, hanya sebesar 0,28 persen saja yang buta aksara.

Dilihat dari sisi gender, pada semua kelompok usia, buta huruf untuk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, kecuali untuk kelompok usia 15-24 tahun. Program pengentasan buta aksara mungkin telah berhasil pada kelompok usia muda (15-24) tahun. Terlihat dari persentase penduduk buta aksara yang sangat kecil, hampir mencapai 0 persen. Akan tetapi, secara umum, buta huruf untuk perempuan masih tetap tinggi.

Hal ini dikarenakan program pengentasan yang dilakukan kemungkinan besar hanya akan diikuti oleh penduduk kelompok usia dewasa saja (25-59) tahun, sedangkan persentase terbesar buta huruf berada pada kelompok usia tua yaitu 60 tahun keatas. Selain itu, mayoritas perempuan yang telah menginjak usia tua (60 tahun ke atas) yang berdomisili di pedesaan cenderung disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga waktunya menjadi terbatas untuk mengikuti pendidikan. Disamping itu, persepsi perempuan lansia akan pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga hal ini menghambat keberhasilan program pengentasan buta aksara.

Jika dilihat lebih rinci, selisih buta huruf di kelompok usia remaja antara perempuan dengan laki-laki hampir tidak terlihat. Menurunnya perbedaan gender dan kecilnya angka buta huruf di usia remaja menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran penduduk akan

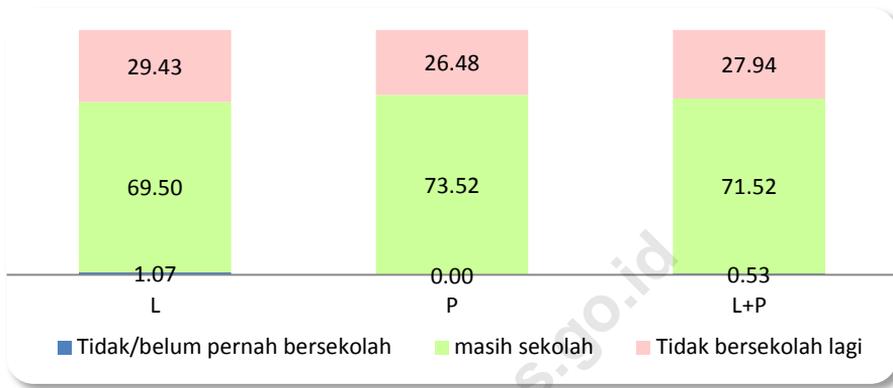
pendidikan dan semakin menipisnya bias gender di masyarakat. Maka dari itu, kebijakan pemerintah seharusnya melihat lebih cermat permasalahan yang ada, sehingga keberhasilan suatu program bisa tertuju pada sasaran yang tepat.

4.3. Penduduk Yang Tidak Bersekolah Lagi

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan kedalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program kearah tersebut. Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan adalah dengan melaksanakan program pembangunan pendidikan untuk semua (Education for All/EFA). Program EFA diarahkan pada upaya-upaya memberikan pendidikan secara terus menerus kepada semua penduduk usia 7 hingga 18 tahun sehingga diharapkan tidak ada penduduk di usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

Pada tahun 2016, tercatat penduduk yang masih mengenyam bangku pendidikan usia 7-24 tahun yang masih bersekolah sebesar 71,52 persen. Namun demikian, pada tahun 2016 masih terdapat penduduk Pinrang usia 7-24 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 0,53 persen. Jika dilihat berdasarkan gender, penduduk laki-laki usia 7-24 tahun yang tergolong dalam kategori tidak sekolah selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Gambar 6. Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

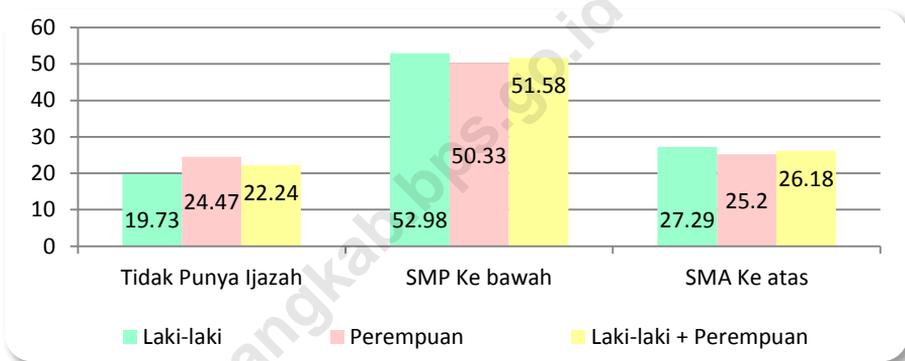
4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Tahun 2016 persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Pinrang mayoritas berada pada kategori SMP ke bawah, yaitu sebesar 51,58 persen, dan terkecil pada kategori tidak punya ijazah, sebesar 22,24 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Komposisi ini menunjukkan kurang baiknya kualitas SDM penduduk Pinrang di tahun 2016.

Dari sudut pandang gender, perlu diperhatikan bahwa masih ada tendensi diskriminatif terhadap kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. Ketimpangan pemerataan pendidikan terjadi baik di tingkat

SMP ke bawah maupun di tingkat SMA ke atas. Terlihat bahwa persentase kepemilikan ijazah oleh penduduk perempuan selalu lebih rendah daripada penduduk laki-laki. Pola semacam ini terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

4.5. Fasilitas Pendidikan Dan Jumlah Siswa

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Pada Tabel 2 terlihat bahwa jumlah sekolah negeri dan swasta tingkat SD/MI sebanyak 351 sekolah, SMP/MTs berjumlah 78 sekolah, SMA/MA berjumlah 23 sekolah dan SMK sebanyak 16 sekolah.

Sama halnya dengan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik dan jumlah murid yang terbesar berada pada tingkat pendidikan SD. Semakin

tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah murid yang tersedia di Kabupaten Pinrang. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang tinggi masih kurang, sehingga jumlah fasilitas pendidikan yang disediakan untuk masyarakat disesuaikan dengan jumlah permintaan itu sendiri.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Tenaga Pendidik, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016

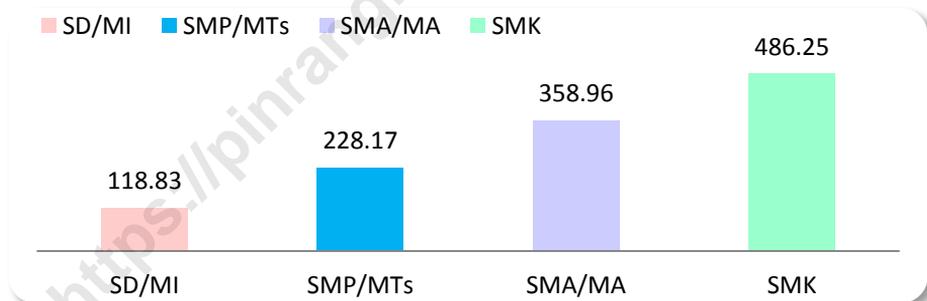
Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Tenaga Pendidik			Jumlah Murid		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	316	35	351	3328	69	3397	40837	871	41708
SMP/MTs	53	25	78	1204	32	1236	17372	425	17797
SMA/MA	12	11	23	418	39	457	7743	513	8256
SMK	10	6	16	469	76	545	6663	1117	7780
	Jumlah		468	Jumlah		5635	Jumlah		75541

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://referensi.data.kemendikbud.go.id>)

4.6. Rasio Murid/Siswa Terhadap Sekolah Dan Guru

Gambar 8 memperlihatkan rasio murid terhadap sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Pinrang tahun 2016. Indikator ini menunjukkan daya tampung rata-rata untuk setiap jenjang pendidikan. Daya tampung SD/MI di Kabupaten Pinrang adalah 118,83 murid. Hal ini berarti bahwa rata-rata setiap SD/MI di Kabupaten Pinrang mampu menampung 118 sampai 119 murid pada satu sekolah tersebut.

Gambar 8. Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang Tahun 2016

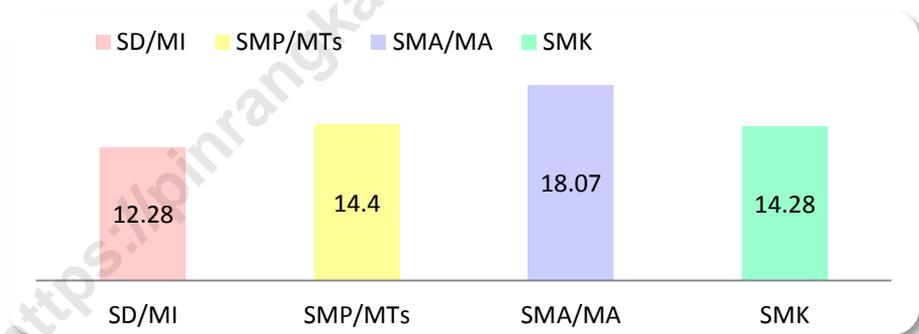


Sumber : Tabel 2 (diolah)

Untuk SMP/MTs, rata-rata daya tampung setiap SMP/MTs di Kabupaten Pinrang adalah 228 sampai 229 murid di satu SMP/MTs. Kemudian, untuk jenjang SMA/MA daya tampung rata-rata adalah 358 sampai 359 murid di tiap SMA/MA. Dan terakhir SMK memiliki daya tampung rata-rata 486-487 murid.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kabupaten Pinrang, maka Kabupaten Pinrang termasuk memiliki beban daya tampung sekolah yang cukup besar, karena rata-rata daya tampung di Kabupaten Pinrang untuk jenjang SD-SMP berada di kisaran 100-an murid, dan untuk jenjang SMA/MA-SMK berada di kisaran 200-an murid. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pinrang kekurangan jumlah sekolah SMP, SMA/MA, dan SMK dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 9. Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



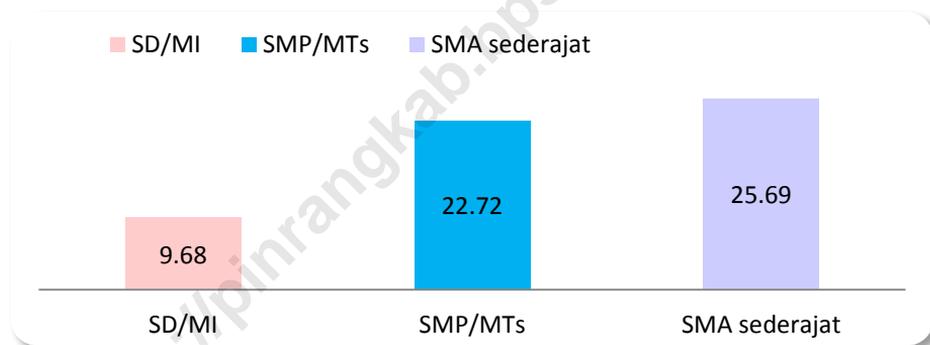
Sumber : Tabel 2 (diolah)

Selanjutnya jika dilihat dari segi beban mengajar untuk setiap guru, terlihat dari Gambar 9 bahwa beban mengajar untuk satu orang guru SD/MI di Kabupaten Pinrang rata-rata 12-13 orang murid. Beban guru SMP/MTs dan SMK adalah rata-rata 14-15 murid. dan beban

terbesar berada pada guru SMA/MA dengan rata-rata seorang guru mengajar 18-19 murid.

Sama halnya dengan daya tampung sekolah, untuk beban mengajar guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang memiliki rata-rata diatas rata-rata Kabupaten Pinrang. Sedangkan untuk guru SD masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Gambar 10. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang Tahun 2016



Sumber : Tabel 2 (diolah)

Informasi dari Gambar 10 menggambarkan rata-rata jumlah guru yang mengajar pada satu sekolah. Jenjang SD rata-rata memiliki 9-10 orang guru. Jenjang SMP/MTs memiliki 22-23 guru, dan SMA sederajat memiliki 25-26 guru.

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari hasil kajian data susenas 2016 sebelumnya, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Pinrang.

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (5-6 tahun) baru mencapai 43,57 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kabupaten yang capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata-rata Kabupaten Pinrang.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA) di Kabupaten Pinrang, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah dari penduduk laki-laki.
3. Hingga tahun 2016 masih terdapat 8,53 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Kabupaten Pinrang.

4. Di Kabupaten Pinrang masih ada sekitar 28,48 persen dari penduduk berusia 7-24 tahun yang tidak bersekolah. Dilihat dari segi gender, persentase penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lebih banyak dibandingkan perempuan.
5. Kualitas SDM penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2016 kurang baik, hal ini terlihat dengan semakin rendahnya kategori jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka semakin kecil persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2016. Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Makassar.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2017. Indeks Pembangunan Manusia 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2017. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.

DATA

MENCERDASKAN
— BANGSA —

<https://pinrangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No. 18 Pinrang, Sulawesi Selatan
Telp./Fax : (0421)921021
E-mail : bps7315@bps.go.id
Homepage : pinrangkab.bps.go.id